

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007, “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis” (Khasan dan Widjanarko, 2011). Banjir adalah jenis bencana alam yang paling kerap terjadi di Indonesia. Banjir juga disebut kondisi aliran permukaan yang relatif tinggi yang tak tertampung saluran drainase ataupun alur sungai, akibatnya ada genangan ataupun limpasan dalam tanah yang seharusnya kering. Kondisi ini dikatakan banjir (Mawardi dan Sulaeman, 2011). Banjir kerap terjadi karena hujan yang hanya berlangsung berjam-jam. Di Indonesia, banjir juga berlangsung di kota-kota besar yakni Jakarta, Surabaya, maupun Semarang. Karena konsep drainase yang salah sejak awal, bencana ini tidak dapat diantisipasi (Agus Riyadi, 2009:43). Kota Semarang terus menghadapi berbagai masalah perkotaan. Ini termasuk masalah pertumbuhan populasi, laju urbanisasi, tata guna lahan dan kawasan, serta masalah banjir dan rob.

Semarang satu dari Kota di Indonesia yang paling rawan atas rob. Rob terjadi ketika permukaan daratan yang lebih rendah dibandingkan dengan perairan menyebabkan air laut tertahan dan membentuk genangan ketika terjadi pasang surut. Bencana ini sudah lama ada dan belum terselesaikan. Karena Kota Semarang

bersebelahan dengan laut di sebelah utara dan karena pembangunan lahan untuk menyediakan kebutuhan penduduk pesisir, maka tanah di daerah utara kota semakin berkurang. Akibatnya, banjir dan rob sering terjadi setelah muka tanah turun, Kota Semarang menjadi sangat rentan terhadap rob (Muzakki, Rizky, and Nafisah 2022). Tidak hanya rob, Banjir limpasan air yang melampaui ketinggian ketinggian air standar dan meluap dari sungai, mengakibatkan terjadinya banjir di daerah rendah sisi sungai (Bakornas, 2007). Sistem aliran air meliputi anak sungai serta sungai alami maupun kanal penampung banjir buatan serta sistem saluran drainase yang ada tak dapat menampung air hujan yang terkumpul, hingga terjadi banjir. Air yang keluar dari sungai disebabkan oleh sedimentasi, penyempitan sungai karena tindakan manusia dan alam, tersumbatnya sampah, dan faktor lain mengubah kemampuan sistem pengaliran air yang tidak maksimal (Nurjanah, 2012).

Kota Semarang menghadapi permasalahan berupa banjir dan rob seakan sudah menyatu dengan sejarah terbentuknya Kota Semarang. Hal ini dapat diketahui cukup lama bahwa kota ini penuh dengan kelokan. Semarang, sebuah kota yang telah berusia dan berliku-liku seperti aliran sungai Semarang dan langsung berhubungan dengan Laut Jawa di sisi utara. Dulu, tinggi air sungai Semarang hingga daerah Bergota hingga kapal-kapal yang datang dari laut bisa berlayar dengan aman ke hulu yang jauh. Pada abad ke-17, Semarang mengalami peningkatan aktivitas perdagangan di pelabuhan yang menghasilkan perkembangan lebih lanjut di sekitarnya. Hal ini terjadi setelah Semarang menjadi wilayah pemerintahan dan adanya perjanjian antara Kerajaan Mataram dengan VOC. Sarana dan prasarana dibangun di sekitar Pelabuhan untuk mendukung aktivitas perdagangan.

Masyarakat mendapat berbagai fasilitas, seperti pemukiman, tempat ibadah, dan pertokoan. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada aspek arsitektural, tetapi juga pada seni, serta pola pikir yang mengikuti perkembangan zaman. Kawasan Kota Lama Semarang mulai berkembang dan menjadi awal modernisasi Semarang. Bangunan-bangunan peninggalan Belanda dengan arsitektur khasnya masih kokoh berdiri hingga saat ini. Salah satu landmark Kota Semarang, Gereja Blenduk, merupakan bukti warisan dari Jalur Rempah yang mencerminkan keragaman budaya dan masyarakat majemuk di tempat ini. Gereja Blenduk juga memberikan banyak corak dalam tahap perkembangan Kota Semarang.

Banjir di Semarang sudah terjadi cukup lama bahkan pada masa kolonialisme. Apalagi hal ini ditambah dengan kondisi kontur wilayah Kota Semarang yang terdiri dari perbukitan sehingga dengan kondisi perbedaan ketinggian yang cenderung curam dapat menyebabkan curah hujan pada daerah hulu akan dengan cepat mengalir ke kawasan hilir. Tidak mengherankan bahwa Belanda merancang rencana pengendalian banjir dengan membangun Banjir Kanal Barat (BKB) pada tahun 1879 dan Banjir Kanal Timur (BKT) pada tahun 1890an. Banjir Kanal Barat dibangun dengan tujuan untuk mengatasi masalah banjir yang ada di daerah Semarang Utara, karena wilayah tersebut dijadikan kawasan Pusat aktivitas perdagangan melalui Pelabuhan Semarang. Sedangkan Banjir Kanal Timur juga dibangun dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi di wilayah Semarang Timur dan Pelabuhan. Banjir Kanal Barat dan Timur tersebut berfungsi sebagai perlindungan bagi Kota Semarang saat sungai mengalami debit tinggi. Menurut Putro dan Hayati (2007), “Selain untuk mengatasi

permasalahan banjir, kanalisasi yang dibangun pemerintah Hindia-Belanda dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian di Kota Semarang”.

Dengan sejarah tersebut maka wilayah Kota Semarang tidak lepas dari permasalahan banjir dan rob. Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan, kecamatan-kecamatan di daerah Kota Semarang yang berpotensi tinggi akan rentan terhadap bencana banjir rob meliputi Semarang Barat, kecamatan Tugu, Semarang Timur, Genuk, serta Semarang tengah (BPBD Kota Semarang). Berikut data bencana yang berlangsung di Kota Semarang beserta dampaknya :

Tabel 1.1
Data Bencana 2018-2023 Di Kota Semarang

No	Jenis kejadian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Banjir & Rob	36	18	23	90	70
2.	Tanah longsor	82	83	175	146	110
3.	Puting beliung	5	20	10	37	28
4.	Rumah Roboh	31	52	46	35	50
5.	Kebakaran	69	45	42	46	39
6.	Pohon Tumbang	45	102	46	78	46
Jumlah kerugian		5.125.000.000	-	2.593.500.000	1.121.000.000	4.933.500.000

Sumber : Data BPBD Kota Semarang 2022

Tabel 1.2
Dampak Bencana 2018-2023 Di Kota Semarang

Dampak Keseluruhan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Korban	-	-	12.888	1.255	27,325
Luka-Luka	9	17	16	4	6
Meninggal	4	8	3	6	4

Sumber : Data BPBD Kota Semarang 2022

Dampak dari banjir dan rob memiliki dampak yang menyebabkan perabotan rusak, kerusakan fisik rumah, kendaraan maupun jalan rusak. Dampak ekonomi berupa toko tutup, kemacetan, hilangnya waktu, aktivitas warga terganggu, dan pembeli sepi. Dampak lingkungan dari sampah, menyebabkan kubangan air. Dampak kesehatan berupa penyakit kulit, diare, iritasi, kutu air, gatal-gatal. (Adiningsih,A.W.(2023).

Dengan adanya bencana banjir pemerintah harus tanggap terhadap bencana yang dimana pemerintah Pusat mengatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Manajemen Bencana Upaya penanggulangan bencana di daerah harus diawali dari penerapan kebijakan wilayah untuk mengatasi bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Strategi menanggulangi bencana yang diberlakukan oleh daerah harus disesuaikan dengan keadaan lokal. Secara nasional, upaya mengatasi bencana wajib dipastikan berlangsung efisien, berkelanjutan, serta efektif. Kota Semarang berpedoman pada sejumlah regulasi dari pemerintah yang ada dan Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan suatu kebijakan, antara lain Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana. Dalam PERDA tersebut dijelaskan bahwa, “Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor”. Selanjutnya juga terdapat dalam PERDA Kota Semarang No 7 Tahun 2014 Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031, didalam peraturan ini mengatur, “Untuk menangani masalah drainase dan mengurangi banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan/penurunan tanah (*land subsidence*), pasang air laut (rob), reklamasi pantai, dan masalah persampahan yang berdampak pada kinerja sistem drainase, diperlukan adanya Rencana Induk Sistem Drainase yang terencana, terarah, dan dilaksanakan secara keberlanjutan”.

Adanya peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang belum bisa menyelesaikan bencana rob maupun banjir yang terjadi di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan tentang bencana. Melihat situasi saat ini, pelaksanaan kebijakan dan implementasi penanggulangan bencana di wilayah Kota Semarang belum optimal dan perlu dievaluasi kembali agar penanganan banjir rob dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta baik. (Bakti, L. M., 2010).

Dari adanya kebijakan tersebut masih adanya bencana banjir dan rob di Kota Semarang, dalam web Nasional.tempo.com memberitakan peristiwa banjir Pada 2010 Selasa (9/10), enam orang meninggal saat banjir bandang yang berlangsung

di barat Kota Semarang. Tempat-tempat yang terdampak adalah Kelurahan Wonosari di Kecamatan Ngalian, Kelurahan Mangunharjo, serta Mangkang Wetan di Kecamatan Tugu. Di masing-masing dari tiga keluaran, banjir yang bermula dari luapan Sungai Beringin membanjiri area sepanjang jalur utama pantai utara hingga dua meter. Tanggul Sungai Beringin, yang membelah Kelurahan Wonosari, jebol di tiga tempat, beberapa di antaranya jebol hingga 250 meter. Pada waktu tersebut hujan terus mengguyur Kota Semarang selama empat jam. Enam korban tewas ditemukan keesokan harinya.

Sejak Sabtu (1/2/2014) malam hingga Selasa pagi, hujan dengan intensitas 20 sentimeter hingga satu meter menyebabkan banjir kembali menggenangi enam kecamatan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kecamatan Genuk memiliki enam kelurahan yang tergenang banjir dengan ketinggian 40 hingga 50 sentimeter. Ini termasuk kelurahan Sebanganom, Genuksari, Sebangsari, Muktiharjo Lor, Karangroto, Banjardowo, dan Trimulyo. Kecamatan Tugu terletak di Kelurahan Mangkang Wetan di Perumahan Mangkang Indah, yang terdiri dari RW 2, 3, 4, 7, dan 8. Warga dievakuasi ke musala RW 1 Mangkang Indah, yang juga berfungsi sebagai dapur umum. Selanjutnya adalah Kelurahan Mangkang Kulon, Randugarut, Karanganyar, dan Mangunharjo. (web.anatra.news.2014).

Pada 23 Mei 2022 lalu, peristiwa banjir pasang air laut (rob) di Tanjung Emas Kota Semarang menjadi salah satu bencana banjir yang terjadi dan menjadi sorotan media massa. Data dari @Semarangkota.go.id menunjukkan bahwa Kelurahan Tanjung Mas di Kecamatan Semarang Utara merupakan salah satu

wilayah yang terdampak dari bencana banjir pasang surut tersebut (Jabbar et al, 2023). Aktivitas manusia mulai terganggu oleh dampak tersebut. Selain itu, Kelurahan Tanjung Mas memiliki peran penting dalam mendukung pergerakan ekonomi Kota Semarang. Terletak di persimpangan jalan strategis, kelurahan ini berdekatan dengan jalan utama, pantai, dan kawasan industri (Nur & Pradoto, 2014). Kelurahan Tanjung Mas merasakan dampak bencana abrasi, termasuk berkurangnya pendapatan masyarakat, tergenangnya rumah oleh air laut, dan berpengaruh pada kondisi sosial di sekitarnya (Fadhilah et al., 2016).

Pelabuhan Tanjung Mas memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan. Semua kegiatan perekonomian, seperti industri dan transportasi laut, dilakukan di wilayah dataran rendah di sekitarnya. Namun, kelemahannya terletak pada kemungkinan terjadinya luapan air di sekitar daerah pelabuhan saat cuaca ekstrem atau iklim buruk (Marfai 2014:26), Pada bulan Mei 2022, BNPB melaporkan bahwa 2.397 bangunan rumah terendam karena banjir rob di Tanjung Emas. Sepuluh wilayah di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas tercatat sebagai wilayah yang terdampak, termasuk delapan kelurahan dan dua kecamatan. Wilayah-wilayah yang terkena dampak antara lain Kelurahan Mangkang, Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Tambak Lorok, Kelurahan Kebonharjo, Kelurahan Kemijen di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara, serta Kecamatan Semarang Timur.

Banjir yang terjadi di Meteseh menjadi perbincangan di media bahkan diberitakan oleh media yang dimana Tanggul yang terletak di Kali Pengkol,

Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang jebol, Jumat (6/1/2023) sore. Kerusakan tanggul terjadi ketika hujan deras dan angin kencang melanda wilayah Tembalang, Kota Semarang. Akibatnya, banjir bandang langsung menerjang wilayah Perum Dinar Indah Meteseh dengan ketinggian air bervariasi dari sekitar 40 centimeter hingga 2,5 meter..

Melihat segala problematika yang ada diatas dapat diketahui bahwa permasalahan banjir dan rob menjadi momok bagi Kota Semarang yang dimana permasalahan tersebut sudah terjadi dimasa Kolonial Belanda hingga sekarang yang dimana data menjelaskan pada masa kolonial Belanda menyusun konsep pengendalian banjir dengan cara membangun Banjir Kanal Timur (BKT) tahun 1890an serta Banjir Kanal Barat (BKB) pada tahun 1879. Setelah adanya PERDA di keluarkan masih terjadi banjir hingga sekarang dapat dilihat data banjir dan rob 2010-2022:

Tabel 1.3
Bencana Banjir 2012-2022

No	Tahun	Jumlah Banjir
1.	2012	8
2.	2013	69
3.	2014	26
4.	2015	48
5.	2016	30
6.	2017	36
7.	2018	36
8.	2019	18
9.	2020	23
10.	2021	90
11.	2022	70
Jumlah		670

Sumber : Data BPBD Kota Semarang 2022

Sesuatu yang membuat peneliti berkeinginan akan hak masalah ini sebab bisa ditunjukkan bahwa permasalahan sudah lama dan data menunjukkan banyaknya bencana banjir dan rob dari 2012-2022 Artinya, Pemerintah Kota Semarang harus lebih fokus pada masalah banjir dan rob tidak hanya itu banjir dan rob berdampak bagi masyarakat luas.

Dampak banjir di Pelabuhan Tanjung Mas Sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas, terdapat 713 kontainer yang terkena dampak banjir rob di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dengan kerugian mencapai Rp 600 miliar. Banjir juga menggenangi jalan pantura Genuk-Demak membuat pengendara roda dua dan empat tidak bisa lewat karena ketinggian air mencapai 50-70 cm dan tidak hanya itu saja BPBD Kota Semarang mencatat banjir yang terjadi Prum Dinar Meteseh mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan masyarakat sekitar mengalami kerugian ratusan juta. Banjir dan rob yang sudah terjadi dari lama memberikan dampak ekonomi yang macet untuk pemabangunan infrastruktur untuk mengatasi rob serta banjir di Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 1.4
Proyek Pengendalian Banjir dan Rob

No	Proyek	Nilai Proyek	Tahun
1.	Normalisasi sungai Detail Engineering Desain (DED) kawasan Sigar Bencah	150 Juta	2012
2.	Normalisasi Kali Tenggang (pengadaan konstruksi kanal permukaan)	600 Juta	2012
3.	Pengadaan konstruksi kanal permukaan peningkatan saluran drainase Kali Tenggang (dari arteri sampai muara)	4.8 Miliar	2012
4.	Pembangunan sub sistem Kali Banger (lanjutan)	2.4 Miliar	2012
5.	Pembangunan Rumah Pompa Trimulyo Kecamatan Genuk	4 Miliar	2013
6.	Pengadaan & pemasangan pompa & ME Pompa Trimulyo	2.5 Miliar	2013
7.	Peningkatan saluran drainase Kali Tenggang (Jembatan LIK Kaligawe 2)	3,2 miliar	
8.	Pengadaan dan pemasangan pompa kapasitas 1500 liter/detik	5,4 miliar	2014
9.	Penyusunan dokumen evaluasi penanganan banjir dan rob	277,5 juta	2014
10.	Paket II & III normalisasi saluran Kali Tenggang	5,9 Miliar	2014
11.	Normalisasi saluran Sriwijaya Tegalsari	2,3 miliar	2014
12.	Pengadaan dan pemasangan pompa dan ME	19 miliar	2015
13.	Pembangunan Rumah Pompa Banjardowo	4,3 miliar	2015
14.	Jasa konsultan supervisi pembangunan tanggul penutup Kali Banger dan pembangunan Kolam Retensi Kemijen	710 juta	2015
15.	DED kolam retensi dan rumah pompa Kampung Bahari Tambaklorok	850 juta	2016
16.	Pengadaan pompa <i>mobile</i>	6 miliar	2017
17.	Peningkatan sub sistem Kali Tenggang	5,9 miliar	2018
18.	Penataan talud saluran Kali Semarang	4,8 miliar	2019
19.	Penanganan banjir di Sungai Penggaron sepanjang 5 km	2,7 miliar	2020
20.	Penanganan banjir Sungai Beringin sepanjang 5,03 km	232 miliar	2020-2022
21.	Pengendalian banjir dan rob Kawasan Tambaklorok tahap II	225,1 miliar	2020-2024
22.	Pengendalian banjir dan rob Semarang Paket II untuk mengurangi dampak rob di Kawasan Industri Terboyo	207 miliar	2021
23.	Normalisasi saluran kawasan Simpanglima (lanjutan)	1 miliar	2021

Sumber: LPSE Kota Semarang, LPSE Pemprov Jateng, Laporan BBWS Pemali-Juana 2022

Permasalahan banjir yang berada di Kota Semarang merupakan permasalahan yang kompleks. Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan kebijakan dan mengimplementasikan dengan adanya proyek 23 infrastruktur guna menanggulangi rob serta banjir yang terjadi di Kota Semarang. Akan tetapi hingga tahun 2023 permasalahan banjir masih terjadi di Kota Semarang

Infrastruktur dipilih sebab lebih mudah dilihat serta selama pemerintah selalu mengandalkan infrastruktur sebagai jalan keluar karena berkaitan dengan penggunaan anggaran. Pemerintah sudah melaksanakan bermacam upaya guna menanggulangi banjir dari DAS tersebut, termasuk melebarkan sungai dengan mengeruk bantaran kali, Tetapi masalah sepertinya tidak kunjung usai yang membuktikan bahwa implementasi kebijakan PERDA tersebut tidak selalu sesuai dengan keadaan lapangan. Pemerintah Kota Semarang yang berwenang harus selalu ketat dalam mengawasi agar tidak ada kelalaian atau pengabaian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Kota Semarang harus membuat rencana menanggulangi bencana, memulai dengan inisiatif dan komitmen pemerintah, mengidentifikasi risiko bencana, mengatur perilaku dan pembagian kerja, dan menentukan cakupan kuasa dan sumber daya yang tersedia untuk tindakan antisipasi dan siap. Sehingga diperlukan adanya penelitian mengenai tahap implementasi kebijakan penanggulangan banjir dan rob yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dan dinas-dinas terkait. untuk

mengetahui implementasi kebijakan mengatasi rob serta banjir maupun memberi umpan balik dan rekomendasi atas kebijakan yang telah di implementasikan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa Banjir Dan Rob Masih Menjadi Permasalahn Di Kota Semarang Meski Telah Terbit PERDA Kota Semarang No 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana & PERDA Kota Semarang No 7 Tahun 2014 Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031?
2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Dan Rob?

1.3 Tujun Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis masalah banjir rob di Kota Semarang
2. Menganalisis Impementasi PERDA Kota Semarang No 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Khususnya Banjir Rob & PERDA Kota Semarang No 7 Tahun 2014 Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031
3. Untuk menjelaskan keseriusan pemerintah dalam membuat ladsan hukum terkait penanggulangan banjir dan rob

1.4 Manfaat

Adapun yang menjadikan kegunaan ataupun manfaat dalam penelitian ini ialah:

A. Manfaat Teoritis

Dari segi teori, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam ilmu sosial dan pemerintahan. Penelitian mendatang di bidang kebijakan sektor publik, terutama terkait dengan Peraturan Walikota Semarang, diharapkan dapat memanfaatkan gagasan yang dikembangkan oleh penelitian ini.

B. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan untuk pembuatan kebijakan sektor publik oleh pemerintah, terutama dinas-dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup di pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun provinsi.

b. Bagi Peneliti Lain

Peneliti diharapkan dapat memperoleh manfaat pengalaman, wawasan yang lebih jauh, dan pengetahuan dari penelitian ini. Keahlian yang diperoleh dapat bermanfaat dan diterapkan dalam dunia kerja, kehidupan sosial, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui penelitian yang efektif, para peneliti diharapkan dapat berkontribusi dalam proses perolehan data.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bermanfaat bagi masyarakat dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam studi ilmu pemerintahan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam mendukung kebijakan pemerintah.

1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang banjir rob. Berdasarkan studi yang sudah ada, dapat dibentuk kategori atau dibagi menjadi tiga isu utama. Pertama, fokus pada pengurangan risiko bencana banjir (Chandra, 2021). Kedua, implementasi kebijakan penanggulangan rob (Ula, 2019).

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Dicky Pangestu Chandra	“Pengurangan Resiko Bencana Banjir Rob Di Kota Dumai”	Teori Dalam penelitian ini, teori yang diterapkan meliputi konsep kepeosisiran, zona pesisir, wilayah dan ekosistem pesisir, definisi bencana, iklim, definisi banjir, dan definisi banjir rob.	Hasil penelitian mencakup beberapa temuan, yaitu: (i) Tingkat kerawanan terhadap banjir rob di Kota Dumai terdiri dari dua tingkat, yaitu rendah dan sedang. (ii) Tingkat kerawanan Kota Dumai terhadap banjir rob mencakup tiga tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. (iii) Kota Dumai memiliki tingkat risiko tinggi

			<p>Metode Pada penelitian ini, digunakan metode deskriptif Kuantitatif dengan data spasial mengenai banjir rob.</p>	<p>terhadap banjir rob. (iv) Tindakan adaptasi masyarakat Kota Dumai mencakup pembuatan hunian sementara. (v) Gagasan untuk mengurangi kemungkinan banjir rob termasuk membuat tempat penampungan sementara barang (63,35%), mengungsi ke rumah kerabat (67,08%), mengalokasikan dana pemulihan bencana dari tabungan (58,73%), dan mendapatkan bantuan dari keluarga (68,10%). (vi) Konsep pengurangan risiko banjir rob di Kota Dumai melalui pendekatan reduksi risiko non-struktural dan struktural. Konsep reduksi risiko non-struktural mencakup penyempurnaan kebijakan persampahan, sosialisasi, pembentukan forum pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, dan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Konsep reduksi risiko struktural mencakup normalisasi sungai dan drainase, pelaksanaan</p>
--	--	--	---	--

				kegiatan peduli lingkungan, pelatihan forum pengurangan risiko bencana, reboisasi dan konservasi hutan, serta penerapan konsep eco-drainage.
2.	Muhamad Najmul Ula	“Implementasi kebijakan Penanggulangan Banjir Rob Di Kabupaten Pekalongan”	<p>Teori Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dan kebijakan yang mengatur.</p> <p>Metode dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif.</p>	<p>Berikut adalah hasil kajian ini: (1) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2017 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021; Kesepakatan Bersama No. 614.11/9/MoU/2017 tentang pengendalian banjir rob di Kabupaten Pekalongan dan Kota serta Roadmap Penanganan banjir di Kabupaten Pekalongan. (2) Implementasi strategi penanganan banjir rob berdasarkan langkah implementasi Hogwood dan Gunn: strategi implementasi terdiri dari daftar pedoman yang tertuang dalam Roadmap Manajemen Rob, tahap persiapan kebijakan penggabungan isu pasang surut sebagai prioritas program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten</p>

				Pekalongan, dan tahap pengkajian kebijakan direkomendasikan kepada masyarakat, pemerintah, dan universitas untuk kebijakan lingkungan dan perencanaan penggunaan lahan yang komprehensif di kawasan tanggul.
--	--	--	--	--

1.6 Kerangka Teori

A. Mitigasi Bencana

Pengurangan risiko bencana dijelaskan oleh definisi ini, yang menggambarkan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Perlindungan sipil diperlukan dengan cara yang terencana dan menyeluruh melalui sejumlah inisiatif. Berdasarkan Joko (2011: 279). “Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik dan membangun kesadaran serta kemampuan tanggap bencana.”

Berikut pendekatannya:

- a. Pendekatan teknis dilakukan untuk mengurangi dampak bencana secara minimalis
- b. Pendekatan manusia bertujuan untuk memberdayakan orang-orang agar memahami dan mengenali risiko bencana.
- c. Pendekatan manajemen umumnya ditempuh oleh pemerintah atau pimpinan organisasi untuk mengimplementasikan manajemen dalam penanggulangan bencana, khususnya pada tahap mitigasi.

- d. Pendekatan budaya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap bencana, sesuai dengan kebijaksanaan masyarakat pada masa lalu.

Implementasi mitigasi bencana dapat dilakukan dalam kebijakan dan dapat diperluas melalui berbagai metode dalam upaya mitigasi bencana.

- a) Pemetaan. Penggunaan strategi peta sangat penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam memprediksi bencana alam. Namun, sampai saat ini, pemanfaatan kartu tersebut belum maksimal. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, termasuk:

- 1) Kartu yang dihasilkan tak disosialisasikan dengan maksimal.
- 2) Roadmap bencana belum terintegrasi.
- 3) Tidak semua daerah di Indonesia sudah dipetakan.
- 4) Roadmap rencana bencana dibuat dengan menggunakan peta rencana dasar yang berbeda, yang mempersulit proses integrasi melalui pengawasan. Pengetahuan awal mengenai tingkat kerawanan dapat diperoleh dengan memprediksi kemungkinan terjadinya bencana suatu saat. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk menyimpan informasi tersebut.

- b) Pengawasan ekonomi dan pelayanan di daerah yang strategis dan vital dilakukan di berbagai daerah yang rentan terhadap bencana.

- c) Penyebaran informasi. Informasi disampaikan dengan poster kepada seluruh warga sekolah tentang prosedur deteksi, pencegahan dan tanggap bencana. Pemberian informasi kepada Media cetak dan elektronik dengan adanya kebencanaan merupakan sarana penyebaran informasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana di suatu wilayah tertentu
- d) Penyampaian informasi dan peningkatan kesadaran mengenai segala aspek kebencanaan dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan warga sekolah dalam menghadapi bencana saat terjadi. hidup selaras dengan alam di daerah bencana, hal-hal yang harus dihindari di daerah rawan bencana, dan cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana adalah hal terpenting yang harus diketahui seluruh warga sekolah.
- e) Pelatihan, menitikberatkan pada prosedur evakuasi darurat dan penyelamatan, dengan tujuan untuk menekankan kepada warga sekolah aliran petugas lapangan di tingkat evakuasi dan penyelamatan korban, serta membentuk kesiapsiagaan bencana tingkat tinggi.
- f) Peringatan dini. Peringatan dini dirancang guna melaporkan taraf aktivitas yang diamati dengan terus-menerus di wilayah rawan sehingga persiapan dapat dilakukan tepat waktu guna memprediksi bencana selama waktu tertentu. Peringatan dini disampaikan kepada semua warga sekolah dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan

B. Implementasi kebijakan

Pelaksanaan kebijakan adalah upaya yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan penetapan kebijakan. Namun, secara hakiki, tanggung jawab pelaksanaan tidak hanya terletak pada individu atau kelompok yang bersangkutan, tetapi juga melibatkan berbagai jaringan kekuatan ekonomi, sosial, serta politik.

Untuk mencapai sasaran tujuan kebijakan, pembentukan program merupakan salah satu kegiatan utama dalam implementasi. Program ini mengandung hipotesis yang merupakan tindakan yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah di lingkungan publik. Sebagai hasilnya, beberapa pilar penting untuk mengoperasikan program telah terbentuk sebagai berikut:

1. Organisasi.

Wadah atau unit untuk menjalankan program sesuai dengan tujuan kebijakan. Organisasi dapat berperan sebagai alat untuk membentuk dan menyusun ulang sumber daya serta metode agar program dapat berjalan dengan baik.

2. Interpretasi.

Program diterjemahkan menjadi rencana dan arahan yang tepat agar mudah diterima dan dilaksanakan.

3. Penerapan.

Terhubung dengan berbagai aturan rutin untuk layanan, pembayaran, atau penyediaan program.

Implementasi kebijakan memiliki empat aspek yang perlu dieksplorasi, seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh Anderson (1979: 68), antara lain: “siapa yang mengimplementasikan, hakikat dari proses administrasi, kepatuhan, dan dampak dari pelaksanaan kebijakan”. Implementasi kebijakan yang akan diwujudkan, penetapan unit-unit pemerintahan atau unit pelaksana adalah suatu keharusan. Unit-unit pelaksana ini umumnya terdiri dari jajaran birokrasi publik dari tingkat puncak hingga terendah. Namun, berdasarkan pandangan para pakar sebelumnya, implementasi juga perlu melibatkan aktor di luar birokrasi, seperti organisasi masyarakat dan individu lain yang terkait.

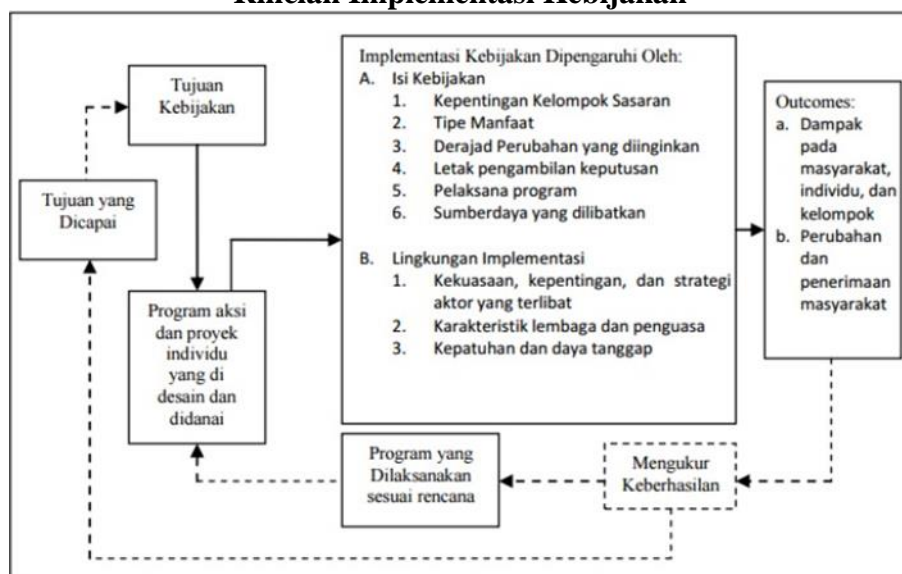
Setelah melalui proses perumusan atau perencanaan, implementasi sebenarnya tidak bisa diabaikan. Baik perencanaan maupun implementasi sama-sama memiliki peran penting dalam pengembangan kebijakan. Implementasi adalah hal yang sangat penting, karena inilah tempat munculnya masalah-masalah di luar konsep awal. Aturannya adalah bahwa tidak ada jaminan bagi aktor tunggal dalam implementasi. Implementator seharusnya melibatkan banyak organisasi, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sumber daya manusia sebagai. Posisi penting dari implementator terkait dengan pengendalian implementasi kebijakan. Keberhasilan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aktor yang saling berkaitan satu sama lain.

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan bisa dilihat dari hasil akhirnya, yang ditandai dengan pencapaian tujuan yang

ingin dicapai. Dua variabel kuat memengaruhi implementasi kebijakan public (Nawawi, 2009) yakni lingkungan implementasi (*context of implementation*) serta isi kebijakan (*content of policy*). Secara mendalam, Grindle menjelaskannya menjadi:

- a. Isi kebijakan (*content of policy*)
- Utilitas yang diterima oleh sasaran kelompok.
 - Sejauh mana kelompok sasaran dimasukkan pada isi kebijakan.
 - Telah akuratkah letak program tersebut.
 - Kecil besarnya perubahan yang diharapkan saat kebijakan diimplementasikan.
 - Sebuah program didorong oleh sumber daya yang sesuai
 - Sebuah rincian kebijakan yang bertanggung jawab untuk implementasi.

Gambar 1.1
Rincian Implementasi Kebijakan



Sumber : Nawawi.2009

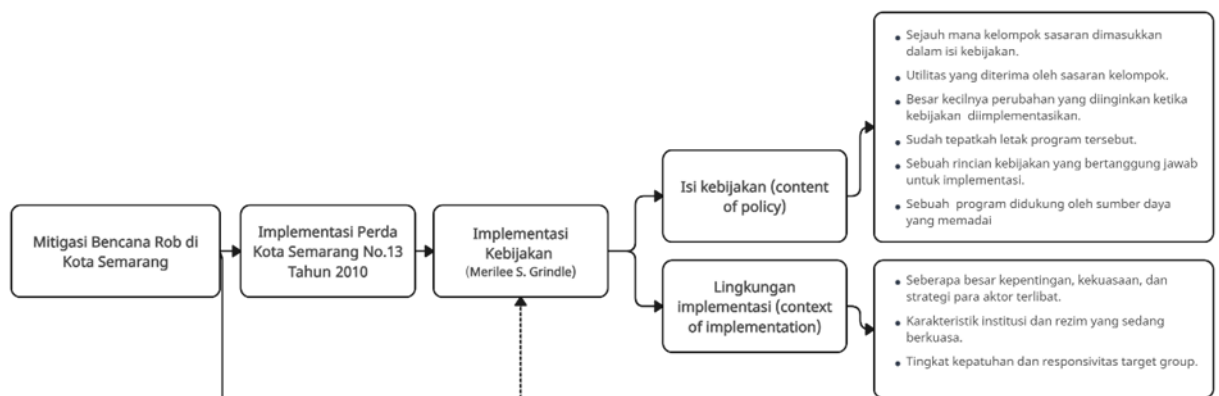
- b. Lingkungan implementasi (context of implementation)
- Besarnya kekuasaan, strategi, serta kepentingan para aktor terkait.
 - Taraf responsivitas serta kepatuhan target group.
 - Karakteristik rezim serta institusi yang tengah berkuasa.

1.7 Operasionalisasi Konsep

A. Kerangka Pemikiran

Dasar dari pada keraangka adalah memudahkan landasan teori yang digunakan untuk memfokuskan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian yang bertujuan untuk memfokuskan arah dalam melakukan penelitian, sehingga dapat menghindari penelitian yang tidak terarah dan terukur. Oleh karenanya kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disajikan dalam data sebagai berikut:

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



B. Kerangka Konseptual

1. Banjir rob yang menjadi permasalahan tahunan di Kota Semarang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat. Masalah banjir rob di Kota Semarang ini bukanlah fenomena baru, melainkan isu yang telah berlangsung cukup lama dan terus memburuk. Dampaknya semakin terasa, tidak hanya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdampak, tetapi juga bagi perjalanan perekonomian di kota tersebut. Permasalahan ini memerlukan penanganan khusus dan terkoordinasi untuk mengurangi kerugian dan penderitaan yang ditimbulkannya.
2. Tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan kebijakan dikenal sebagai implementasi kebijakan. Namun, tanggung jawab implementasi sebenarnya tidak hanya berada pada individu atau kelompok tersebut. Implementasi kebijakan juga melibatkan jaringan kekuatan yang lebih luas, termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial. Beban tanggung jawab ini harus dibagi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses kebijakan untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Mitigasi bencana melibatkan berbagai upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Usaha-usaha ini mencakup pembangunan infrastruktur fisik serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan membangun kesadaran dan memperkuat tanggapan bencana, risiko yang

dihadapi dapat diminimalkan melalui tindakan-tindakan preventif yang terencana dan sistematis.

4. Grindle mengatakan jika kesuksesan suatu implementasi kebijakan bisa dilihat dari hasil akhir. Lebih lanjutnya, penelitian ini dilaksanakan 2022 setelah terjadi banjir rob didaerah pesisir Kota Semarang Keberhasilan diindikasikan oleh pencapaian tujuan yang diinginkan. yakni konteks implementasi (*context of implementation*) serta isi kebijakan (*content of policy*).

Tabel 1.6
Kerangka Konseptual

Aspek	Variabel	Penjelasan	Indikator
Mitigasi Bencana	serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik dan membangun kesadaran serta kemampuan tanggap bencana	(a) pendekatan teknis, dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana; (b) pendekatan manusia, yang bertujuan untuk mendidik orang-orang yang memahami dan mengenali risiko bencana. (c) pendekatan manajemen, yang umumnya ditempuh. oleh pemerintah atau pimpinan organisasi untuk melakukan pendekatan manajerial dalam	1. pembangunan apa saja yang sudah dilaksanakan dan belum 2. penyuluhan atau sosialisasi dilaksanakan dimasyarakat 3. seberapa serius pemerintah dalam meminimalisir bencana 4. mitigasi apa saja yang dilakukan masyarakat

		<p>penanggulangan bencana, khususnya pada tahap mitigasi. (d) Pendekatan budaya, yaitu pendekatan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bencana. Untuk itu, mitigasi bencana sesuai dengan kearifan masyarakat zaman dahulu</p>	
<p>Teori Merile S. Grindle</p>	<p>Isi kebijakan (<i>content of policy</i>)</p>	<p>Bahwa pelaksanaan suatu kebijakan selalu melibatkan berbagai kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut memengaruhi implementasinya</p> <p>Manfaat dari implementasi suatu kebijakan menunjukkan dampak positif bagi target implementasinya</p> <p>Target yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Poin ini juga menekankan pada skala yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. apakah masyarakat dilibatkan dalam pembentukan kebijakan 2. apakah kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bagaimana manfaatnya 3. bagaimana perubahan yang ada setelah adanya kebijakan 4. memberikaan masukan atau saran kepada pemerintah

		<p>jelas untuk menargetkan seberapa besar perubahan yang diinginkan oleh suatu implementasi kebijakan.</p> <p>Pelaksana kebijakan harus memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan.</p> <p>Implementasi suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar implementasinya berjalan dengan baik.</p>	5. bagaimana implementasi kebijakan selama ini
	Lingkungan implementasi (context of implementation)	<p>Menjelaskan bagaimana kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat untuk memperlancar jalannya implementasi kebijakan.</p> <p>Membahas karakteristik dari</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktor yang terlibat 2. Bagaimanata nggapan pemerintah dalam mitigasi bencana

		<p>suatu lembaga yang akan mempengaruhi kebijakan.</p> <p>Bagian ini mengulas tentang kepatuhan dan respons dari para pelaksana, serta sejauh mana kepatuhan dan respons mereka terhadap kebijakan yang diimplementasikan.</p>	
<p>Implementasi PERDA Kota Semarang No. 13 Tahun 2010</p>	<p>Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Semarang</p>	<p>Pasal 33 ayat 2 “(2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. pelaksanaan penataan ruang;</p> <p>b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan</p> <p>c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. . Pembangunan apa saja yang sudah dilakukan 2. Respon masyarakat terhadap kebijakan 3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mitigasi 4. Apa saja upaya yang dilakuakn dalam mitigasi

1.8 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan tanpa melakukan perlakuan terhadap objek yang diteliti. Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan Bogdan dan Taylor (1972:5) dalam (Moleong, 2018), “penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti adalah mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengelompokkannya, dan melakukan analisis korelasi dari semua informasi yang diperoleh (Moleong, 2018). Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipilih adalah melalui triangulasi data, yang mencakup wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Melalui penelitian ini berusaha untuk menggambarkan, menganalisis ataupun mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir dan Rob Di Kota Semarang, selain itu di dalam ini juga berusaha menjelaskan penyebab banjir dan rob Di Kota Semarang serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang beserta BPBD, DPU dan BAPPEDA dalam mengatasi

banjir dan rob Di Kota Semarang.

B. Studi Penelitian

Secara sederhana, situs penelitian adalah lokasi di mana penelitian dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang yang sedang menerapkan kebijakan penanggulangan banjir rob sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana., PERDA PERDA Kota Semarang No 7 Tahun 2014 Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031?

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini meliputi BPBD, DPU dan BAPPEDA, masyarakat umum Pada penelitian ini ketiga subyek penelitian tersebut memiliki peran penting sebagai informan dalam pencarian data terkait penelitian ini.

Objek penelitian yang dipilih dalam riset ini yang pertama yaitu BPBD Kota Semarang sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebagai penyusun perencanaan dan pelaksana, melaksanakan koordinasi antar lembaga di daerah maupun sebagai pemegang komando dalam keadaan tanggap darurat, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Yang kedua yaitu DPU Kota Semarang sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab akan pelaksanaan infrastruktur d Kota Semarang guna

mengendalikan bencana banjir dan rob. Objek yang ketiga yaitu BAPPEDA memiliki tugas untuk melaksanakan perencanaan pembangunan Daerah, menyusun perencanaan pembangunan Daerah, menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah. Dan informan yang keempat, lima dan enam yaitu masyarakat Kota Semarang yang terdampak bencana banjir dan rob selama ini.

D. Jenis Data dan Sumber Data

- i. Jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari : Data Primer Data primer merupakan jenis data yang didapat dari sumber langsung yaitu informan pada pengumpul data dalam kaitan ini yaitu peneliti. Untuk memperoleh data primer ini terdapat beberapa cara yang biasa ditempuh yaitu melalui hasil wawancara dengan narasumber dan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti secara langsung tanpa melalui perantara.
- ii. Data Sekunder Data sekunder merupakan jenis data yang didapatkan secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Hardani, 2020). Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa jurnal-jurnal, dokumen, laporan, artikel, data ataupun bahan bacaan lainnya yang masih relevan dengan topik penelitian.

E. Pengumpulan Data

i. Wawancara

Dalam pengumpulan data melalui wawancara, penulis mengajukan pertanyaan kepada responden terkait pertanyaan penelitian, dan hasilnya berupa data pendukung. Moleong (2018) menjelaskan bahwa wawancara merupakan dialog dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee). Metode wawancara digunakan untuk bertemu langsung dengan informan dan mengajukan pertanyaan tentang implementasi kebijakan pengendalian banjir dan rob kepada BPBD, DPU, BAPPEDA dan masyarakat Kota Semarang. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait permasalahan banjir dan rob di Kota Semarang masih terjadi walaupun telah terbit PERDA tentang banjir dan rob.

ii. Observasi

Observasi dimulai dengan mengidentifikasi lokasi yang akan diteliti yaitu. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan terstruktur maupun semi struktur berdasarkan data-data yang berada di lapangan. Melalui observasi pula peneliti dapat mengambil data yang mungkin tidak diungkapkan partisipan dalam proses wawancara. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati terkait bagaimana tindakan yang dilakukan BPBD, DPU, BAPPEDA dalam menanggulangi bencana

secara teknis ataupun infrastruktur pemabangunan guna mengatasi banjir dan rob yang berdampak negative bagi masyarakat Kota Semarang.

iii. Dokumentasi

Dalam penelitian Sugiyono (2015:82), dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lampau, baik berupa tulisan, karya terdahulu seseorang, atau gambar. Dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat argumen, bukti telah melakukan penelitian secara langsung. Mendokumentasikan terkait laporan pembangunan pompa air, Normalisasi DAS, tanggul laut secara langsung

iv. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, penelitian sebelumnya, atau literatur yang relevan. Literatur ilmiah adalah bagian integral dari penelitian, memastikan bahwa analisis tetap mengikuti kaidah ilmiah yang berlaku. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses analisis dan menjaga integritas ilmiah penelitian (Sugiyono, 2015). Pada ini peneliti banyak mendapatkan informasi melalui media web Pemerintah Kota Semarang, BPBD, DPU dan BAPPEDA dan film dokumenter tenggelam dalam diam serta buku banjir sudah naik seleher.

F. Analisis dan Intepretasi Data

Peneliti menerapkan teknik analisis data kualitatif, sehingga data yang diperoleh dan dihasilkan berupa keterangan, bukan angka. Teknik analisis yang dipilih adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (1972: 5) dalam Moleong (2018), penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Proses analisis data ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

i. Reduksi data

Peneliti yang sering terjun langsung ke lapangan akan mengumpulkan semakin banyak data. Namun, data tersebut perlu melalui proses analisis reduksi untuk menyortir, mempertajam, dan mengorganisirnya agar dapat ditarik kesimpulan serta dilakukan verifikasi. Proses ini penting untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menemukan hal-hal baru. Ketika peneliti menemukan hal baru, itulah yang harus diperhatikan dengan cermat. Oleh karena itu, proses reduksi data membutuhkan tingkat berpikir yang sensitif dan teliti.

ii. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan dalam menyusun laporan penelitian yang telah dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang disajikan mencakup penjelasan rinci baik dari hasil wawancara dengan narasumber maupun dari proses observasi.

Penyajian data dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti diagram, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Di dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk melakukan penyajian data yang berkaitan dengan implementasi penanggulangan bencana banjir dan rob di Kota Semarang serta penyajian analisis penyebab banjir dan rob dan solusi dari Pemerintah Kota Semarang melalui BPBD, DPU, BAPPEDA.

iii. Penarikan kesimpulan

Peneliti menyimpulkan data yang telah ditafsirkan, disertai dengan penjelasan yang mendalam. Penarikan kesimpulan dibagi menjadi dua tahap: kesimpulan sementara dan kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara dibuat ketika peneliti menemukan penambahan data selama proses analisis, sehingga diperlukan verifikasi ulang. Setelah verifikasi selesai dan tidak ada data baru yang mempengaruhi hasil, kesimpulan akhir ditetapkan dari hasil temuan peneliti setelah melakukan pengumpulan data secara langsung dari wawancara, observasi, studi pustaka yang dikumpulkan dari BPBD, DPU, BAPPEDA, masyarakat terdampak banjir dan rob Di Kota Semarang.